

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1. Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata asing yaitu "*accounting*", yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan.

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dan dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

2.1.1.1. Pengertian Akuntansi

Menurut Dwi Martani, Sylvia, Ratna, Aria dan Edward (2012:4) akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah bahasa bisnis (*business language*), akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang.”

Sedangkan pengertian akuntansi menurut Kieso, *et al.* (2014 : 4) adalah :

“Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.”

Menurut James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac (2012 : 9) akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.”

Dari definisi di atas, disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan dan melaporkan aktivitas atau transaksi suatu badan usaha yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut dalam bentuk informasi keuangan.

2.1.1.2. Jenis-jenis Akuntansi

1. Akuntansi Keuangan

Bidang akuntansi yang secara khusus mempelajari tentang transaksi-transaksi keuangan seperti utang (kewajiban), modal (ekuitas), ataupun perubahan aset perusahaan.

2. Akuntansi Manajemen

Bidang akuntansi yang memberikan data *real* kepada pihak internal perusahaan (manajemen) untuk menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya.

3. Akuntansi Biaya

Bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengefisieni biaya produksi ataupun biaya-biaya yang lain.

4. Akuntansi Pajak

Bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengurus perpajakan. Dalam hal ini untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayarkan perusahaan tanpa menyalahi aturan yang berlaku.

5. Akuntansi Pemeriksaan

Bidang akuntansi berupa pemeriksaan atas laporan pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Akuntansi pemeriksaan ini biasa disebut dengan audit, dan orang yang mengaudit disebut auditor.

6. Akuntansi Pemerintahan

Bidang akuntansi yang mempelajari tentang penyajian data laporan keuangan atau *financial statement* yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, baik lembaga daerah atau pusat.

7. Sistem Akuntansi

Bidang akuntansi ini berhubungan dengan proses pembuatan prosedur akuntansi atau alat-alat pendukungnya, serta diikuti oleh penentuan langkah-langkah yang akan diambil kedepannya.

8. Akuntansi Internasional

Bidang akuntansi yang mempelajari masalah-masalah Internasional seperti perdagangan Internasional yang umum terjadi di perusahaan multinasional atau Internasional.

Dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Pemerintahan.

2.1.1.3. Akuntansi Pemerintahan

Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (*Public Finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*Budget Execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

Menurut Indra Bastian (2010 : 6) akuntansi pemerintahan adalah :

“Akuntansi Pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor public dan swasta.”

Menurut Mardiasmo (2007 : 14) akuntansi pemerintahan adalah :

“Akuntansi Pemerintahan merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.”

Menurut Abdul Halim (2004 : 18) akuntansi pemerintahan adalah:

“Akuntansi Pemerintahan merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternative arah tindakan.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik, alat informasi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

2.1.1.4. Tujuan Akuntansi Pemerintahan

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) yang dikutip oleh Indra Bastian (2010 : 77) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintah adalah untuk :

1. “Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.”

Akuntansi Pemerintah terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Di mana, bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

2.1.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.2.1. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Triandis (1980) dalam HL Geovannie (2016:3) mengemukakan bahwa :

“Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengetahuan seseorang di lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh perasaan individu terhadap penggunaan komputer, faktor sosial di lingkungan tempat kerja yang menggunakan komputer, kebiasaan individu saat menggunakan komputer, konsekuensi yang dirasakan individu yang diharapkan dari penggunaan komputer, dan kondisi yang memfasilitasi dalam lingkungan kondusif yang menggunakan komputer dan alat teknologi lainnya.”

Menurut Thompson *et al* (1991) dalam Irine Chintya (2015:3):

“Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan”.

Menurut Jogiyanto (1995) dalam Fadila Ariesta (2013:6) pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut :

“Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku karyawan teknologi dengan tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang digunakan”.

2.1.2.2. Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Santiadji Mustafa (2010) Konstruksi pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator:

1. “Perangkat, merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan.
2. Pengelolaan Data Keuangan, merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh.
3. Perawatan, merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan”.

Menurut Thompson *et al* (1991) dalam HL Geovannie (2016:7),

pengukuran pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan sebagai berikut:

1. “Intensitas pemanfaatan (*intensity of use*)
2. Frekuensi pemanfaatan (*frequency of use*)
3. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (*diversity of software package used*)”.

Adapun penjelasan pengukuran pemanfaatan teknologi informasi menurut

penjelasan lain adalah sebagai berikut:

1. Intensitas pemanfaatan (*intensity of use*)
Menurut Ardi Hamzah (2009) dalam Irma Yuni Kurnia (2015:31), “Minat (*intention*) atau intensitas pemanfaatan yang tinggi terhadap penggunaan Teknologi Sistem Informasi akan menumbuhkan perilaku yang menunjang pemanfaatan teknologi sistem informasi”. Menurut Argo Wikanjati dalam Kamus Bahasa Indonesia (2012) Intensitas adalah “Keadaan, tingkatan, dan ukuran intensnya”.
2. Frekuensi pemanfaatan (*frequency of use*)
Menurut Siti Taufik Muntianah, dkk. (2012) Irma Yuni Kurnia (2015:31), “Pengukuran penggunaan sesungguhnya (*actual use*) diukur sebagai jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu teknologi dan besarnya frekuensi penggunaannya”. Menurut Argo Wikanjati dalam Kamus Bahasa Indonesia (2012) frekuensi adalah, “jumlah kejadian yang lengkap atau fungsi muncul dalam suatu waktu; pada bidang elektronik, biasanya mengacu pada banyaknya gelombang yang diulangi per detik, diukur dalam hertz; banyaknya objek dalam suatu kategori”.
3. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (*diversity of software package used*)
Menurut Agus Mulyanto (2009: 88) Irma Yuni Kurnia (2015:32), perangkat lunak aplikasi adalah program yang ditulis oleh manusia untuk melakukan tugas-tugas atau memecahkan masalah tertentu. Perangkat lunak aplikasi masih dibedakan menjadi dua jenis yaitu,

program aplikasi umum dan program aplikasi khusus. Program aplikasi umum merupakan program yang melakukan tugas atau pemrosesan secara umum bagi para pengguna akhir, misal pengolah kata, *spreadsheet*, DBMS, *e-mail sender*, *web browser*, dan lain sebagainya. Sedangkan program aplikasi khusus adalah program yang secara khusus digunakan untuk mendukung aplikasi khusus untuk para pemakai seperti aplikasi untuk bisnis, aplikasi untuk pendidikan, aplikasi multimedia, dan aplikasi lainnya yang digunakan sesuai dengan bidangnya.

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2010), pemanfaatan teknologi informasi pada sebagian besar perusahaan saat ini bukan lagi menjadi barang langka yang sulit ditemukan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi informasi telah menjadi kebutuhan sekaligus persyaratan bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Teknologi informasi sangat dibutuhkan organisasi untuk membantu mencapai tujuannya, namun pengadaan Teknologi informasi membutuhkan investasi yang besar. Investasi Teknologi informasi yang sudah dikeluarkan perusahaan harus dapat dijalankan dengan maksimal. Teknologi informasi pada organisasi tidak cukup hanya diatur (*manage*) oleh bagian Teknologi informasi saja, tetapi harus dikelola (*govern*) secara profesional. Pengelolaan Teknologi informasi yang profesional disebut sebagai tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*).

2.1.2.3.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Investasi organisasi pada teknologi informasi membutuhkan dana yang besar dan beresiko. Untuk membuat keputusan yang lebihinformatif, maka pengembangan sistem perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja individu menurut Triandis (1980:28) dalam HL Geovannie (2016:3), yaitu:

- 1) “Konsekuensi yang dirasakan (*Perceived Consequences*)
didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh dimasa datang, seperti peningkatan fleksibilitas, merubah pekerjaan atau peningkatan kesempatan bagi pekerjaan yang lebih berarti.
- 2) Faktor Sosial (*Social Factors*)
diartikan sebagai internalisasi individu dari referensi kelompok budaya subyektif (norma, peran, dan nilai-nilai) dan mengkhususkan persetujuan antar pribadi bahwa individu telah berusaha dengan yang lain pada situasi sosial khusus.
- 3) Perasaan Individu (*Affect*)
diartikan mengacu pada emosi murni, sukacita, kegembiraan, kesenangan, depresi, ketidaksukaan, ketidakpuasan, atau kebencian yang berhubungan dengan individu tertentu dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- 4) Niat (*Intention*)
sejauh mana seorang individu bersedia untuk mencoba dan berinovasi dalam mengerahkan pekerjaannya untuk menggunakan teknologi informasi.
- 5) Kebiasaan (*Habit*)
menjelaskan pada perilaku yang telah menjadi otomatis dan rutin berulang-ulang dalam kegiatan individual menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja individual dalam melaksanakan tugas.
- 6) Kondisi yang Memfasilitasi (*Facilitating Condition*)
didefinisikan sebagai faktor obyektif di dalam lingkungan yang memudahkan pemakai dalam bertindak/bekerja”.

2.1.3. Sistem Pengendalian Internal

2.1.3.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal kendala pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efisien dan efektif.

Dalam perusahaan, pengendalian intern dimaksudkan agar kesalahan dan penyimpangan yang disebabkan oleh faktor manusia baik yang disengaja maupun tidak, dapat ditekan. Pengendalian intern tidak hanya menyangkut masalah penelaahan atas catatan, tetapi juga meliputi penilaian atas berbagai fungsi operasional dalam suatu perusahaan. Untuk itu, diperlukan pengendalian intern yang baik yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengendalikan perusahaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pengertian pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut COSO dalam Azhar Susanto (2013 : 95) pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya dan ketaatan terhadap undang-undang serta aturan yang berlaku.”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013 : 24) definisi pengendalian internal adalah sebagai berikut :

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dari suatu entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian golongan tujuan berikut ini : (a) efektifitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan laporan keuangan dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal secara luas didefinisikan sebagai proses yang ditempatkan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selanjutnya untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2.1.3.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan asset Negara, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Menurut Arens, et. Al. (2011 : 198) dalam Herman Wibowo memaparkan tiga tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif sebagai berikut :

1. “Reliabilitas Pelaporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung

jawab pelaporan keuangan tersebut. Indikator untuk menggambarkan reliabilitas pelaporan keuangan adalah:

- a. Laporan keuangan disajikan secara wajar, laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pemakainya, serta tidak terdapat ketidakpastian yang luar biasa (material).
- b. Laporan keuangan disajikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.

2. Efisiensi dan Efektivitas Operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan, tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Manajemen harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian.

Tujuan penggunaan ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang telah dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif. Indikator untuk menggambarkan efisiensi dan efektivitas operasi adalah:

- a. Efisiensi dan efektivitas operasi, efisiensi mengukur seberapa baik suatu entitas menggunakan sumber dayanya dalam mencapai tujuannya. Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.
- b. Optimalisasi sumber daya, instansi mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran instansi.

3. Ketaatan pihak Hukum dan Peraturan

Organisasi-organisasi publik, non publik dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti undang-undang perlindungan hukum dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan. Indikator untuk menggambarkan ketaatan pada hukum dan peraturan adalah:

- a. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku, pengendalian internal yang baik akan mampu mendorong setiap personal untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan berkaitan erat dengan akuntansi.

- b. Ketaatan pada hukum serta peraturan yang dapat secara material mempengaruhi pelaporan keuangan, kelemahan dalam desain atau pelaksanaan pengendalian internal dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan.”

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP No. 60 Tahun

2008 adalah sebagai berikut:

- “1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah di atas dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan
Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.
3. Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya

pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan.

2.1.3.3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Indra Bastian (2010 : 130), Unsur pokok pengendalian intern tersebut disajikan secara rinci terdapat empat dari setiap unsur pokok sistem pengendalian intern tersebut :

1. “Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional secara Tegas.
2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup terhadap Aset, Utang, Pendapatan, dan Beban.
3. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi,
4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya.”

Menurut Mulyadi (2014 : 164) unsur pokok sistem pengendalian internal adalah :

1. “Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
Struktur organisasi merupakan kerangka (*Framework*) pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan.
Pembagian tanggungjawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
 - a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Fungsi akuntansi adalah fungsi

yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Dengan memisahkan fungsi akuntansi dari fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi sesungguhnya yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan fungsi penyimpanan.

- b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapat dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat system yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggungjawab fungsional dan system wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara yang menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah :

- a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi.
- b. Pemeriksaan mendadak (*Surprised Audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang, atau satu unit organisasi, tanpa ada campir tangan dari orang atau unit organisasi lain. Karena setiap transaksi dilaksanakan dengan campur tangan pihak lain, sehingga terjadi internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait, maka setiap unit organisasi yang akan melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Perputaran jabatan (*Job Rotation*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persengkongkolan di antara mereka harus dihindari.

- e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara waktu tersebut.
 - f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.
 - g. Pembetulan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian internal yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawas internal atau staf pemeriksa internal. Agar efektif dalam menjalankan tugasnya, satuan pengawas internal ini harus tidak melaksanakan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi, serta harus bertanggung jawab langsung kepada manajemen puncak. Adanya satuan pengawas internal dalam perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitiannya dan keandalannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.
 Bagaimana pun sebaiknya struktur organisasi, system otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Diantara empat unsur pokok pengendalian internal tersebut, unsur mutu karyawan merupakan unsur system pengendalian internal yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Di lain pihak, meskipun tiga unsur system pengendalian internal yang lain cukup kuat, namun jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak berkompeten dan tidak jujur maka empat tujuan system pengendalian internal tidak akan tercapai.
- Untuk mendapat karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, dapat ditempuh melalui berbagai cara antara lain :
- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
 Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tuntutan tanggungjawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan.
 - b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan. Sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.”

2.1.3.4.Indikator Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Lingkungan Pengendalian.
2. Penilaian Risiko.
3. Pengendalian Aktivitas.
4. Informasi dan Komunikasi.
5. Aktivitas Pemantauan.”

Komponen-komponen pengendalian internal yang disebutkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. “Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
Lingkungan pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian :
 - a. Integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Partisipasi dewan direksi dan tim auditor.
 - d. Filosofi dan gaya manajemen.
 - e. Struktur organisasi.
 - f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab.
 - g. Kebijakan mengenai sumber daya manusia dan penerapannya.
2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)
Penilaian risiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Ada beberapa prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko :
 - a. Organisasi menentukan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
 - b. Organisasi mengidentifikasikan risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
 - c. Organisasi mempertimbangkan potensi penipuan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
 - d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi system pengendalian intern.

3. Pengendalian Aktivitas (*Control Activities*)

Pengendalian aktivitas adalah kebijakan dan prosedur yang dimiliki manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian :

- a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima.
 - b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
 - c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.
- ### 4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
- Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang di dalam maupun di luar perusahaan. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung komponen informasi dan komunikasi yaitu:
- a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
 - b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal.
 - c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.
- ### 5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)
- Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen ada dan berfungsi.”

2.1.3.5. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

Sebaik-baiknya desain dan operasi pengendalian intern, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan usaha untuk mencapai tujuan pengendalian intern organisasi. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan

bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam mengambil keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut seperti kekeliruan atau kesalahan yang bersifat sederhana. Disamping itu, pengendalian intern dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern.

COSO (2013 : 9) menjelaskan mengenai keterbatasan-keterbatasan pengendalian internal, bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lainnya, bahkan sistem pengendalian intern yang efektif dapat mengalami kegagalan.

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013 : 110), pengendalian intern memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. “Kesalahan (*Error*).
2. Kolusi (*Collusion*).
3. Penyimpangan Manajemen.
4. Manfaat dan Biaya.”

Keterbatasan-keterbatasan sistem pengendalian internal yang telah disebutkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. “Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perharinya selama bekerja terpecah.
2. Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (Korupsi) ditempat mereka bekerja.
3. Penyimpangan manajemen terjadi karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otorisasi dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada manajemen bawah, tidak efektif pada tingkat manajemen atas.
4. Biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang dihasilkan. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang membiarkan

manfaat lebih tinggi dari biaya dikeluarkannya untuk melakukan pengendalian tersebut.”

2.1.3.6. Pihak yang Bertanggung Jawab atas Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2014 : 181) menyatakan bahwa terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal yaitu sebagai berikut :

1. “Manajemen
Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian internal organisasinya.
2. Dewan Komisaris dan Komite Audit
Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal.
3. Auditor Internal
Bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian internal entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya.
4. Personel Lain Entitas
Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian internal harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.
5. Auditor Independen
Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian internal kliennya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit atau dewan komisaris.
6. Pihak Luar Lain
Pihak luar lain yang bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas adalah badan pengatur, seperti Bank Indonesia dan Bapepam.”

2.1.4. Kualitas Laporan Keuangan

2.1.4.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala

pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Daniel dan Suhardjo, 2013). Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud.

Definisi Kualitas menurut Mulyana (2010 : 96) adalah sebagai berikut :

“Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.”

Berdasarkan pengertian di atas, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi

yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Menurut Indra Bastian (2010 : 9) pengertian kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston dalam Sam Setyautama (2008), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambaran yang disajikan lewat data financial, dan semakin mendekati kebenaran.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.

Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan :

“Laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta

dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.

2.1.4.2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara umum, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus, tujuan laporan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan hal berikut.

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah menandai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, agar pihak perusahaan, manajemen, dapat mengambil keputusan dari laporan dan pihak-pihak yang memakai informasi agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

2.1.4.3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*Budgetary Reports*), laporan financial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan financial terdiri atas Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan financial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan financial.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan, antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan, antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu asset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri atas asset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri atas pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendapatan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri atas penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum Negara/daerah.

(b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum Negara/daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.4.4.Indikator Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa :

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1. “Relevan (*Relevance*)

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan harus seperti berikut:

- a. Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
- b. Manfaat Prediktif (*Predictive Value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat Waktu (*Timeliness*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.
- d. Lengkap (*Complete*), artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

2. Andal (*Reliable*)

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik berikut:

- a. Jujur (*Representational Faithfulness*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*Verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
- c. Netralitas (*Neutral*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat Dibandingkan (*Comparable*)

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami (*Understandable*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.”

2.1.4.5. Pengguna Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. “Masyarakat.
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.”

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*Statutory Reports*).

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Siti Soimah (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.	Perbedaannya terletak pada variabel independen yaitu, Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sedangkan penulis memiliki variabel independen Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal.

		Bengkulu Utara		
2.	Tuti Herawati (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (survey pada organisasi perangkat daerah pemda cianjur)	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Perbedaannya yaitu terletak pada variabel independen, peneliti hanya meneliti Sistem Pengendalian Intern, sedangkan penulis menambahkan variabel independennya yaitu pemanfaatan teknologi informasi.
3.	As Syifa Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Perbedaannya terletak pada variabel independen, karena peneliti memiliki 4 variabel independen, sedangkan penulis hanya memiliki 2 variabel independen.

		Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)		
4.	Desiana Anugrah Budiawan (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah i Bogor Provinsi Jawa Barat).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Perbedaannya terletak pada variabel independen, peneliti hanya memiliki variabel Sistem Pengendalian Intern, dan memiliki variabel moderating yaitu Akuntabilitas Keuangan. Sedangkan penulis menambahkan variabel independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan tidak memiliki variabel moderating.
5.	Siti Soimah (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap	Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan	Perbedaannya terletak pada variabel independen yaitu, Akuntabilitas Publik dan Sistem

		<p>Kualitas Laporan Keuangan dan implementasinya terhadap akuntabilitas keuangan (penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di pemerintah daerah kabupaten wilayah provinsi jawa barat)</p>	<p>Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan</p>	<p>Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sedangkan penulis memiliki variabel independen Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal.</p>
--	--	--	--	--

Tabel 2.2

Perbedaan Penelitian

	Variabel Independen	Variabel Dependen	Tempat Penelitian	Metode Penelitian
As Syifa Nurillah (2014)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD Kota Depok	Kuantitatif: -Deskriptif -Verifikatif

	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern			
	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	BPKAD Kota Bandung	Kuantitatif: -Deskriptif -Verifikatif

2.2. Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berguna bagi kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan harus disusun secara baik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

2.2.1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut As Syifa Nurillah, (2014) menyimpulkan pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

”Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks.”

Penelitian Indriasari dkk (2011) menunjukkan bahwa :

“Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks”.

Wahyudi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pengendalian Internal Akuntansi Sebagai Intervening menyatakan bahwa :

“Pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

berpengaruh signifikan, karena memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta dapat mengurangi kesalahan yang terjadi.

2.2.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pengendalian intern menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. info akuntansi perusahaan tersebut akan dapat relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengendalian intern dalam menjamin kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah menurut Mahmudi (2010 : 27) dalam buku “Manajemen Kinerja Sektor Publik” adalah sebagai berikut:

“Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”.

Menurut Tantriani Sukmaningrum (2011 : 38) pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu :

”Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan pondasi (*good governance*) dan garis pertama dalam melawan ketidaksihonestan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh

signifikan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

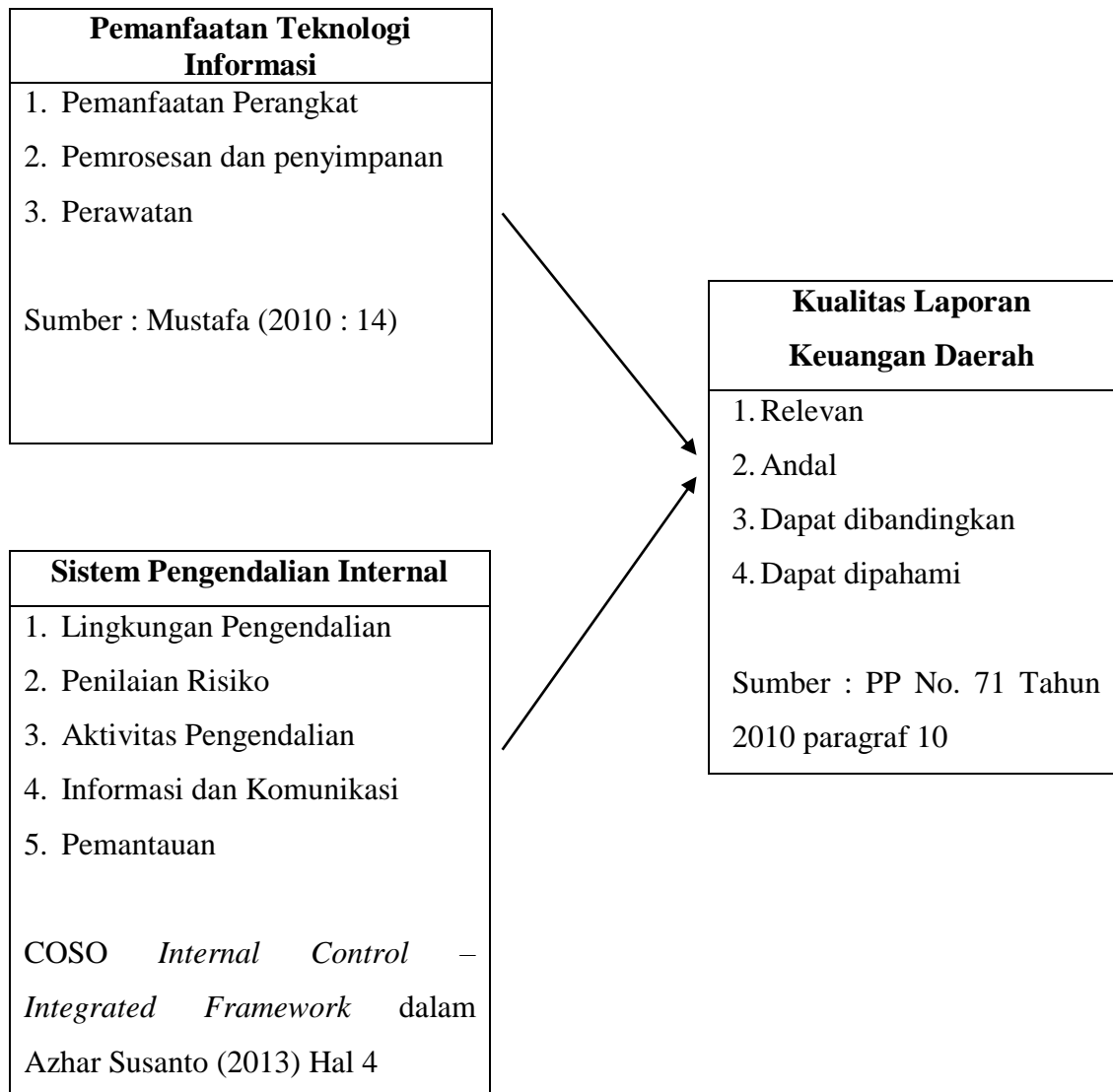
2.2.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Riedy Riadi (2012) bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegritas dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (*Internal Control*).

Nurillah, As Syifa dan Muid Dul (2014) melakukan penelitian kualitas laporan keuangan ditinjau dari sumber sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kapasitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel pegawai SKPD Kota Depok. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem

pengendalian internal, kapasitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan dengan adanya teknologi informasi dapat diminimalisasi kesalahan pencatatan dan sistem pengendalian internal mampu memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan pemerintah daerah.



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2014 : 93) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ = Terdapat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

H₂ = Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

H₃ = Terdapat Pengaruh Pemanfaatan teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah